

Laporan Kinerja 2022



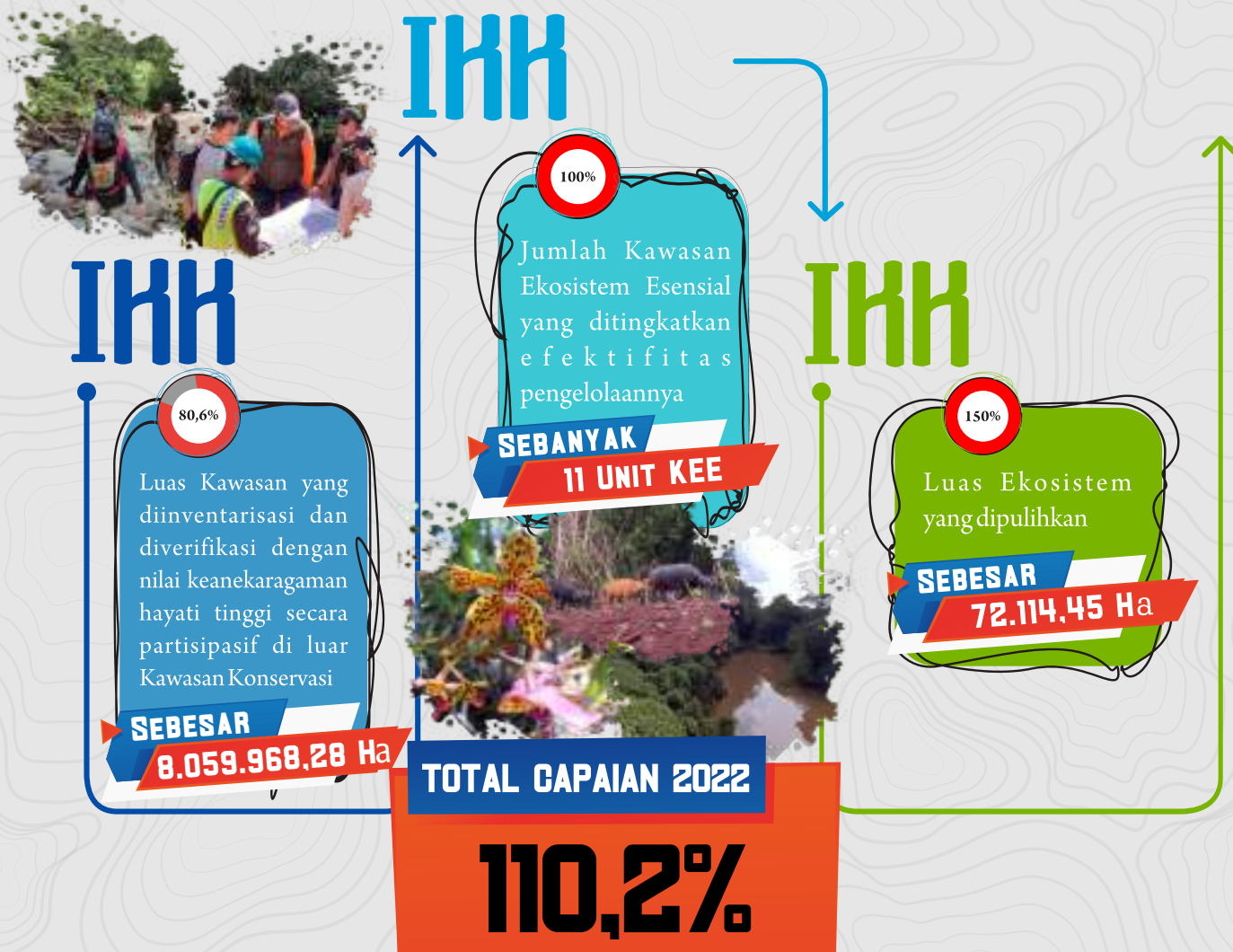
DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN EKOSISTEM

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN EKOSISTEM
TAHUN 2022

Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2022

Ikhtisar Eksekutif



JANUARI

1



Raport evaluasi 2021
Persiapan kegiatan 2022

FEBRUARI

2



Dr. Ir. Ammy Nurwati, MM
Direktur BPPE yang baru



Penyambutan World Wetlands Day 2022,
SM Pulau Rambut, Jakarta

MARET

3



Rakor tematik Dit BPPE



Rakor persiapan verifikasi
Pemerintahan Ekosistem

4

APRIL



CPNS baru Dit BPPE



Podcast : Perempuan dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam Berkelanjutan

KALEIDOSKOP

5

MEI



Sinkronisasi dan Integrasi Data dan Informasi
Pemulihan Ekosistem Di Kawasan Konservasi

JUNI

6



Bimbingan teknis inventarisasi dan verifikasi
potensi keanekaragaman hayati tinggi di luar
KSA, KPA dan TB tahun 2022



Bimbingan Teknis peningkatan efektivitas
pengelolaan KIE

BPPE 2022

7

JULI

Penilaian
nominasi
penerima
apresiasi
IKAN



Coaching
Clinic
Penyusunan
(DUPAK)
Jabatan
Fungsional
Analisa
Kebijakan



Bimbingan Teknis Percepatan Kegiatan
Pemulihan Ekosistem

8

AGUSTUS

Pelatihan Pengenalan Jenis Mangrove
dan Burung Air/Migran di Kawasan
Lahan Basah Mangrove Teluk
Pangpang



17 an BPPE



9

September



Hari
Konservasi
Akan
nasional, TN
Bali Barat

10

Oktober



Verifikasi Potensi
Keanekaragaman Hayati
Tinggi dan Penyusunan
Data Potensi
Keanekaragaman Hayati
Tinggi di Luar KSA, KPA
dan TS



Verifikasi Capaian Pemulihan Ekosistem di
Kawasan Konservasi Tahun 2022

11

November



COP 14
Ramsar
Jember,
Switzerland

12

Desember

Bimbingan
Teknis
pembahasan
data situs
Ramsar di
Indonesia



Penyusunan
laporan
kegiatan
2022



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'alaah atas petunjuk dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem (BPPE) Tahun 2022 telah selesai disusun. Laporan Kinerja (LKj) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja / Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar peraturan tersebut, Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, Substansi materi yang termuat dalam laporan ini, secara umum memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Direktorat BPPE selama Tahun 2022.



Dr. Ir. Ammy Nurwati, M. M

Pencapaian kinerja Direktorat BPPE tidak lepas dari berkontribusi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen KSDAE yaitu Balai Besar/ Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Balai Besar/ Balai Taman Nasional sebagai pelaksana di tingkat tapak. Capaian Kinerja Direktorat BPPE Tahun 2022 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja Direktorat BPPE. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik perbaikan dan peningkatan kinerja Direktorat BPPE secara berkelanjutan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja (LKj) Direktorat BPPE Tahun 2022 dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas tugas dan fungsi serta kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendorong kinerja Direktorat BPPE.


Direktur BPPE

Dr. Ir. Ammy Nurwati, M.M
NIP. 196908211994032001

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif
Kaleidoskop
Kata Pengantar

III
IV
V

01

Pendahuluan

Pendahuluan
Profil SDM Dit. BPPE
Isu Strategis

1, 2
4
5

02

Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja
Target Pemulihan Ekosistem

03

Akuntabilitas Kerja

Akuntabilitas Kerja 12, 13
Peta Hasil Inver 15
Cerita UPT Tentang Inver 18
Peta Kawasan KEE 20
Output dan outcome
kegiatan peningkatan 24
efektivitas KEE
Cerita dari Taman Kehati 30
Capaian Pemulihan Ekosistem 32
Cerita dari UPT 38
tentang Pemulihan Ekosistem
Realisasi Anggaran 39

6, 7
11

04

Penutup

Penutup 41, 42

PENDAHULUAN



01

I. PENDAHULUAN

A. Struktur Organisasi

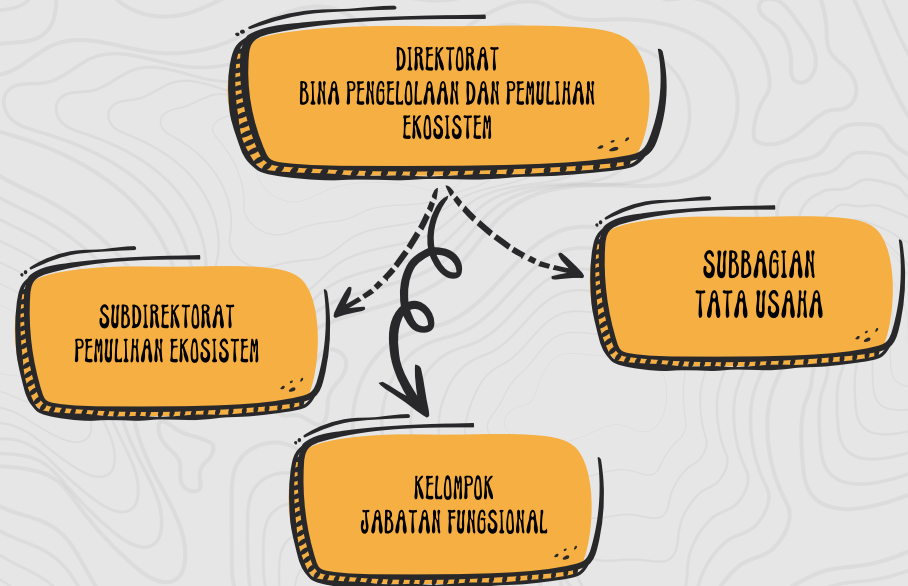
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 1 Juli 2021, bahwa ada perubahan nomenklatur organisasi dari Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (Direktorat BPPE) menjadi Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem (Direktorat BPPE). Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pengelolaan dan pemulihan ekosistem, serta pembinaan pengelolaan ekosistem Esensial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Direktorat BPPE menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemolaan, pemetaandan penetapan ekosistem esensial, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial, serta perencanaan dan pemulihan ekosistem pada kawasan ekosistem esensial, kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan, pemetaan dan penetapan ekosistem esensial, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial, serta perencanaan dan pemulihan ekosistem pada kawasan ekosistem esensial, kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan, pemetaan dan penetapan ekosistem esensial, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial, serta perencanaan dan pemulihan ekosistem pada kawasan ekosistem esensial, kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
4. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan, pemetaan dan penetapan ekosistem esensial, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial, serta perencanaan dan pemulihan ekosistem pada kawasan ekosistem esensial, kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemolaan, pemetaan dan penetapan ekosistem esensial, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial, serta perencanaan dan pemulihan ekosistem pada kawasan ekosistem esensial, kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemolaan, pemetaan dan penetapan ekosistem esensial, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial, serta perencanaan dan pemulihan ekosistem pada kawasan ekosistem esensial, hutan raya, dan taman buru; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat BPPE merupakan bagian dari Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Direktorat BPPE Terdiri atas : 1) Subdirektorat Pemulihan Ekosistem; 2) Subbagian Tata Usaha; 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan kegiatan di lapangan, Direktorat BPPE memiliki mitra kerja pelaksana teknis yang terdiri atas Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kehutanan di daerah, serta UPT Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA/BKSDA) dan Balai Besar/Balai Taman Nasional (TN) lingkup Ditjen KSDAE disamping Pusat Pengelolaan Ekoregion di bawah Sekretariat Jenderal KLHK.



Profil SDM Direktorat BPPE

27 PNS
4 CPNS
7 PPNP



2 S3	7 D3
10 S2	3 SMA
16 S1	



38
PEGAWAI

- 1 Eselon 2
- 1 Eselon 3
- 1 Eselon 4
- 14 Jabatan Fungsional Tertentu
- 21 Jabatan Pelaksana



Jenis Kelamin





Komitmen para pihak turut mendukung keberhasilan melaksanakan kegiatan Pemulihan Ekosistem dan upaya perlindungan kawasan yang memiliki keanekaragaman kehati tinggi di luar kawasan konservasi



Transformasi konsep dan kebijakan arah pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial



Refocusing Anggaran

ISU STRATEGIS

Sinkronisasi dan integrasi program kegiatan mulai dari tingkat tapak hingga Nasional



Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, termasuk Pengarusutamaan Gender



PERENCANAAN KINERJA



02

II. PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022 merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Konservasi	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	10 Juta Hektar
2	Terselenggaranya pembinaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial yang efektif	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	11 Unit KEE
3	Meningkatnya Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi	Luas ekosistem yang dipulihkan	24.912,48 Hektar

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rencana Capaian			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial	Meningkatnya kawasan yang dilakukan inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	10 Juta Ha	0	0	3,4 juta Ha	10 juta Ha
				Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada koordinasi dan persiapan bimbingan teknis	Pelaksanaan kegiatan berupa bimbingan teknis inventarisasi potensi keanekaragaman hayati tinggi	Target capaian inventarisasi potensi keanekaragaman hayati tinggi meliputi UPT pada region Jawa, Sumatera dan Sulawesi	Seluruh target luasan inventarisasi potensi keanekaragaman hayati tinggi diharapkan tercapai dan telah dilaksanakan proses verifikasi melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi Tim Pusat
	Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan ekosistem esensial	Jumlah kawasan ekosistem esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	11 Unit KEE	0	0	5 KEE	11 KEE
				Pelaksanaan kegiatan berupa review NSPK	Pelaksanaan kegiatan berupa bimbingan teknis	Target capaian peningkatan efektivitas KEE pada region Jawa	Seluruh target (11 unit KEE) tercapai
Pemulihan Ekosistem	Meningkatnya pemulihan ekosistem di kawasan konservasi	Luas ekosistem yang dipulihkan	24.912,28 Ha	0	0	13.750 Ha	24.912,28 Ha
				Pelaksanaan kegiatan meliputi koordinasi dan penyusunan NSPK	Pelaksanaan kegiatan berupa bimbingan teknis	Target capaian luas ekosistem yang dipulihkan pada region Sumatera dan Jawa	Target luas ekosistem tercapai

Target Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi

No	UPT Penanggung Jawab	Target Luasan InVer (Ha)	Realisasi Target (Ha)
1	BKSDA NAD	393.933	292.031,98
2	BBKSDA Sumatera Utara	283.568	297.793,11
3	BKSDA Sumatera Barat	156.607	0,00
4	BBKSDA Riau	711.502	682.968,01
5	BKSDA Bengkulu	156.820	187.726,12
6	BKSDA Sumatera Selatan	351.922	341.674,46
7	BKSDA Jambi	145.482	195.864,61
8	BKSDA Kalimantan Selatan	61.656	107.629,51
9	BKSDA Kalimantan Tengah	1.271.937	1.664.269,20
10	BKSDA Kalimantan Timur	874.801	348.317,16
11	BKSDA Kalimantan Barat	1.871.326	281.299,27
12	BBKSDA Jawa Barat	169.800	26.610,52
13	BKSDA Jawa Tengah	159.100	78.365,05
14	BBKSDA Jawa Timur	0	2.852,66
15	BKSDA DIY	0	0,00
16	BKSDA Jakarta	0	0,00
17	BBKSDA Sulawesi Selatan	502.112	607.583,89
18	BKSDA Sulawesi Tengah	389.247	0,00
19	BKSDA Sulawesi Tenggara	225.725	254.181,16
20	BKSDA Sulawesi Utara	129.019	72.526,68
21	BKSDA Bali	0	0,00
22	BKSDA NTB	0	0,00
23	BBKSDA NTT	0	50.935,90
24	BKSDA Maluku	197.802	0,00
25	BBKSDA Papua	1.767.713	2.008.186,98
26	BBKSDA Papua Barat	508.828	559.152,00
		10.328.900	8.059.968

**Lokasi Target Kawasan Ekosistem Esensial
yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya**

No	Nama Unit KEE	Tipologi	Lokasi	Unit Penanggung Jawab
1.	Taman Kehati Jombang	Taman Kehati	Kabupaten Jombang, Jawa Timur	BBKSDA Jawa Timur
2.	Taman Kehati Sekadau	Taman Kehati	Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat	BKSDA Kalimantan Barat
3.	Taman Kehati Puti Sabati	Taman Kehati	Kota Solok, Sumatera Barat	BKSDA Sumatera Barat
4.	KEE Karst Ciamis	Karst	Kabupaten Ciamis, Jawa Barat	BBKSDA Jawa Barat
5.	KEE Mangrove Mojo	Lahan Basah	Kabupaten Pematang, Jawa Tengah	BKSDA Jawa Tengah
6.	KEE Mangrove Jaring Halus	Lahan Basah	Kabupaten Langkat, Sumatera Utara	BBKSDA Sumatera Utara
7.	ABKT Petungkriyono	ABKT	Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah	BKSDA Jawa Tengah
8.	ABKT Ciamis	ABKT	Kabupaten Ciamis, Jawa Barat	BBKSDA Jawa Barat
9.	ABKT Kuala Lupak	ABKT	Kabupaten Barito Kuala Lupak, Kalimantan Selatan	BKSDA Kalimantan Selatan
10.	Koridor Hidupan Liar Tanjung Binerean	Koridor	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	BKSDA Sulawesi Utara
11.	Koridor Hidupan Liar Penyu Lombok Barat	Koridor	Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat	BKSDA NTB

Target Pemulihan Ekosistem

IKK pemulihan ekosistem pada tahun 2022 terpisah dari IKK luas opened area yang ditangani. Target IKK Pemulihan ekosistem mencakup keseluruhan usulan target pada tahun 2020 dan 2021 secara kumulatif. Luasan target pemulihan ekosistem kawasan konservasi pada renstra 2020-2024 adalah 200.000 ha. Perencanaan pencapaian target secara keseluruhan.



Penjabaran target Pemulihan Ekosistem 2020-2024



AKUNTABILITAS KINERJA



03

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat BPPE Tahun 2022

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Konservasi	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	10.000 Ha	8.059.968,28 Ha	80,6
2	Terselenggaranya pembinaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial yang efektif	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	11 Unit KEE	11 Unit KEE	100
3	Meningkatnya pemulihan ekosistem di kawasan konservasi	Luas ekosistem yang dipulihkan	24.912,48 Ha	72.114,45 Ha	150
Capaian Kinerja Direktorat BPPE					110,20



1. Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi (10.000.000 Ha)

Sebagian besar satwaliar ini dijumpai berada di kawasan Hutan Produksi dan atau Hutan Lindung. Di sisi lain, diduga terdapat sekitar 57 Juta Ha Areal yang memiliki Keanekaragaman Hayati yang tinggi di luar kawasan konservasi berupa kawasan HP, HL, dan APL, dengan 43,2 juta Ha diantaranya ada disebelah barat Garis Webber yang harus dipertahankan (RPJMN 2020 - 2024). Untuk itu, sebagai amanat Rencana Strategis KLHK dan Ditjen KSDAE 2020-2024, perlu dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap kawasan-kawasan penting bagi keanekaragaman hayati, terutama yang lokasinya berada di luar kawasan konservasi.

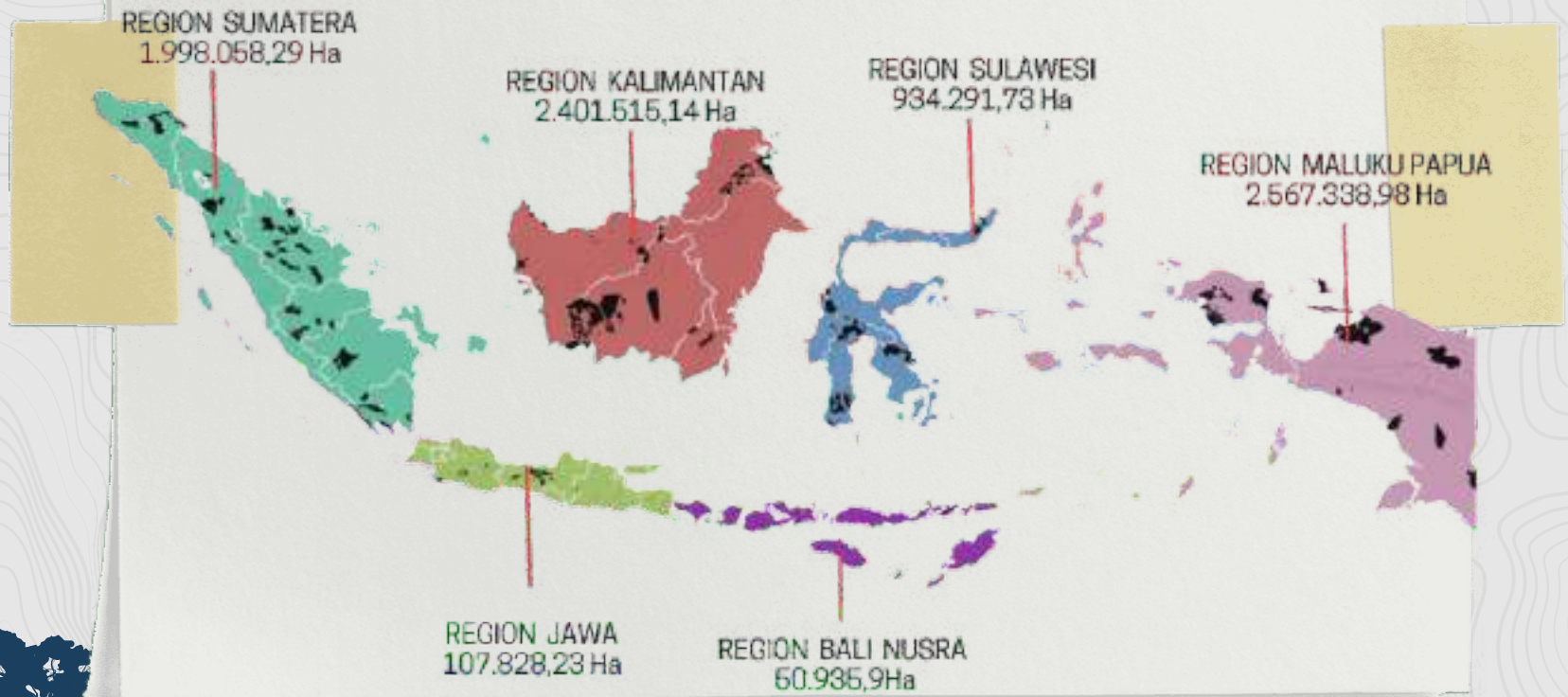
Tahun 2022 merupakan tahun ke 3 pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi di luar kawasan konservasi. Target untuk tahun 2022, sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem, adalah seluas 10 juta hektar.

Sampai dengan 31 Desember 2022, telah terverifikasi 8.059.968,28 hektar areal di seluruh Indonesia. Dari total luasan terverifikasi tersebut, sekitar 3 juta hektar diantaranya terverifikasi ke dalam kategori keanekaragaman hayati tinggi. Adapun output dari kegiatan ini adalah laporan hasil inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi di luar kawasan konservasi yang disertai dengan peta masing-masing lokasi target yang telah diverifikasi. Selain itu, sebagai penjabaran dari peta, juga disusun register kawasan dengan nilai kehati tinggi di luar kawasan konservasi. Register ini memuat setiap area yang terverifikasi beserta keterangan detil kehati di dalamnya.

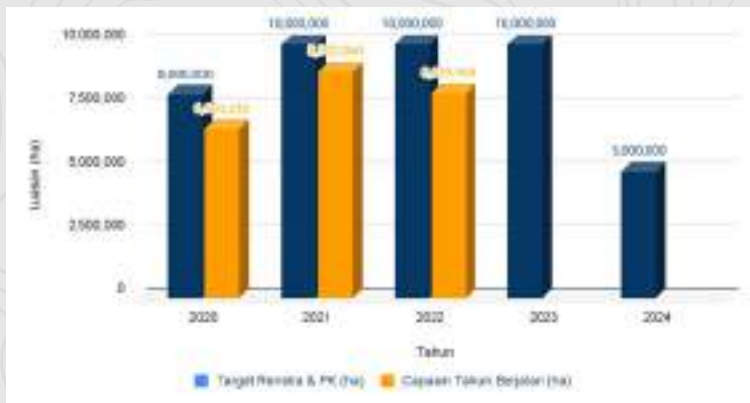


Peta Hasil Inver 2022

**Hasil Inventarisasi dan Verifikasi
Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi
di luar KSA, KPA dan TB tahun 2022**



Hasil capaian Tahun 2022 berada dibawah target luasan area yang terverifikasi. Berdasarkan analisis, hasil capaian indikator kinerja Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di secara partisipatif di Luar Kawasan Konservasi adalah 80,60% dari target yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Untuk diketahui, secara kumulatif pada periode 2020-2022, telah terverifikasi area seluas 23.783.703,75 hektar di seluruh Indonesia (dilengkapi data dan peta), dimana 56% atau 13,5 juta hektar diantaranya terverifikasi keanekaragaman hayati tinggi.



Target dan Capaian Hasil Inver 2020 - 2022

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya pengurangan pagu anggaran inventarisasi dan verifikasi kehati, baik dalam kerangka refocusing maupun self-blocking anggaran kegiatan. Selain itu, masih terdapat gap pengetahuan pada SDM pelaksana, baik untuk pengetahuan ekologi tumbuhan satwaliar maupun terkait analisis data spasial. Di sisi lain, komunikasi dan koordinasi dengan para pihak masih perlu diperbaiki karena kegiatan inventarisasi ini memerlukan keterlibatan para pihak pemilik/pengelola kawasan di tingkat tapak seperti pemerintah daerah, akademisi, masyarakat ataupun dunia usaha.



Capaian Hasil Inver 2020 - 2022

Beberapa hal telah dilakukan sebagai upaya menjawab tantangan pelaksanaan di tingkat tapak. Di tingkat pusat, Direktorat BPPE telah melaksanakan Bimbingan Teknis inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi di luar kawasan konservasi. Pada kegiatan ini tim pelaksana Balai Besar/Balai KSDA diberikan pengetahuan untuk pelaksanaan kegiatan, diantaranya teknik analisis satwaliar tertentu dan teknik analisis spasial. Selain itu, dalam kegiatan bimbingan teknis juga diberikan kesempatan bagi para pelaksana lapangan untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan saling menceritakan best practice pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya masing-masing.

Di tingkat UPT, tantangan berupa kurangnya anggaran dan minimnya data dapat diatasi dengan menggunakan data sekunder sebagai data permulaan. Data sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai pihak, salah satunya dari repositori karya ilmiah (skripsi/tesis/desertasi/hasil penelitian) pada perpustakaan perguruan tinggi di lokasi terkait. Selain itu, UPT Ditjen KSDAE juga diharapkan dapat membangun relasi, komunikasi, pemahaman, antar aktor dan otoritas termasuk dalam hal berbagi data dan informasi serta membentuk forum diskusi.



Cerita dari UPT tentang Inver



pelibatan akademisi dalam kegiatan

Pengalaman dan best practice pelaksanaan kegiatan di tingkat UPT Ditjen KSDAE diantaranya dari Balai KSDA Kalimantan Timur dan Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. Kedua UPT Ditjen KSDAE menyampaikan pentingnya membangun relasi dan koordinasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, perguruan tinggi maupun dunia usaha. Hal ini penting untuk memberikan dan mendapatkan pemahaman yang sama tentang kegiatan inventarisasi kehati ini. Selain itu, pada setiap tahapan kegiatan inventarisasi dan verifikasi kehati sebaiknya selalu melibatkan para pemangku kepentingan tersebut. Pelibatan ini akan membantu dan memudahkan proses pengumpulan data dan informasi di lapangan



koordinasi intensif dengan
PEMDA setempat

Outcome

1. Tumbuhnya kesadaran Pemerintah Daerah dan para pihak terkait keberadaan kawasan dengan nilai kehati tinggi di luar kawasan konservasi sehingga upaya mainstreaming kawasan dengan kehati tinggi menjadi salah satu dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan.



2. Terselenggaranya intervensi manajemen kawasan dengan kehati tinggi yang memberikan manfaat secara ekologis maupun ekonomi dan social budaya kepada masyarakat



2. Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya (11 Unit KEE)



Berdasarkan target tahun 2022, dilakukan kegiatan peningkatan efektivitas pengelolaan KEE di 11 Unit KEE dan dikoordinir pelaksanaannya oleh 9 UPT BBKSDA/BKSDA sesuai dengan standar kegiatan dan biaya (SKB) yang telah disusun. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada UPT BBKSDA/ BKSDA dapat berupa kegiatan perencanaan (penyusunan dokumen Rencana Aksi Pengelolaan/RAP, Rencana Kegiatan Pengelolaan/RKP, dan Desain Dasar), maupun implementasi dari dokumen rencana pengelolaan yang telah disusun, yang meliputi kegiatan perlindungan KEE, pengawetan kehati, pemulihan ekosistem, dan pemanfaatan secara berkelanjutan pada KEE.

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, diketahui bahwa kegiatan peningkatan efektivitas pengelolaan KEE dapat dilaksanakan pada 11 lokasi yang menjadi target IKK tahun 2022. Dengan demikian target IKK pada tahun 2022 dapat dicapai 100% dari total lokasi target tahun 2022, baik berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022 maupun berdasarkan Renstra Ditjen KSDAE 2020-2024 dengan total capaian sampai dengan tahun 2022 sebanyak 33 unit KEE.

Keberhasilan capaian output kinerja tersebut tidak terlepas dari komitmen pengelola KEE dan para pihak, serta peran Direktorat BPPE dalam melaksanakan kegiatan pembinaan pengelolaan KEE melalui komponen kegiatan:

- a. Penyusunan/Review Pedoman Pengelolaan KEE;
- b. Bimtek/Koordinasi Pengelolaan KEE; serta
- c. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan KEE.



Metode yang digunakan:

Pada tahun 2021, pemantauan kemajuan pengelolaan KEE di 11 lokasi target menggunakan Peraturan Dirjen KSDAE nomor P.1/KSDAE/BPE2/KSA.4/2/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial. Pada tanggal 5 Juli 2022, Menteri LHK mengeluarkan keputusan berkenaan dengan Pencabutan atas Perdirjen tersebut melalui Surat Keputusan Menteri LHK nomor SK.682/MENLHK/SETJEN/KSA.4/7/2022. Namun demikian IKK Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya sebanyak 55 unit KEE tetap berlaku dan menjadi target kinerja KSDAE sampai dengan tahun 2024 sesuai dengan mandat RPJMN 2020-2024. Oleh karena itu pada tahun 2022, kegiatan untuk menilai pencapaian IKK2 tetap harus dilaksanakan. Sehingga pada tahun 2022, pemantauan kemajuan pengelolaan KEE dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis yang dilakukan pada tanggal 17 Juni 2022 sebelum SK Menteri LHK nomor SK.682/MENLHK/SETJEN/KSA.4/7/2022. Bimbingan teknis dihadiri oleh perwakilan dari UPT di lokasi target dengan tujuan sebagai berikut:
 - Sosialisasi kepada UPT terkait Perdirjen KSDAE No. P.1/KSDAE/BPE2/KSA.4/2/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial.
 - Memberikan panduan kepada UPT terkait pengisian kuisioner Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial
 - Meningkatkan kapasitas pengelola KEE khususnya UPT Balai/Balai Besar KSDA dalam melakukan penilaian efektivitas pengelolaan KEE sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE nomor P.1/KSDAE/BPE2/KSA.4/2/2021.
 - Melakukan evaluasi terhadap penilaian efektivitas pengelolaan KEE di Tahun 2020 dan 2021
2. Melakukan verifikasi kegiatan pengelolaan melalui koordinasi dengan UPT dan stakeholder pada 11 lokasi target.
3. Setelah diterbitkannya SK Menteri LHK nomor SK.682/MENLHK/SETJEN/KSA.4/7/2022 tentang Pencabutan Perdirjen 1 Tahun 2021, pemantauan terhadap kemajuan pengelolaan KEE di 11 lokasi target pada tahun 2022 dilakukan dengan cara antara lain:



- Menggunakan kuesioner secara daring melalui link <https://bit.ly/PemantauanEfektivitasNov2022> dan disampaikan kepada UPT lokasi target dan pengelola Taman Kehati melalui surat Direktur BPPE nomor S.120/BPPE/DPE/KSA.4/11/2022. Beberapa aspek yang masuk dalam pengisian kuesioner adalah: Profil ABKT/Koridor/Lahan Basah/Taman Kehati/Karst (nilai penting, tujuan, ancaman, SK), Perencanaan, Anggaran, Sarana dan Prasarana, Data Pengelolaan, Perlindungan, Pengawetan Kehati, Pemulihan, Pemanfaatan Berkelanjutan, Output dan Outcome. Selanjutnya hasil pemantauan kemajuan pengelolaan KEE dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk masing-masing aspek diatas.
- Koordinasi dengan UPT BKSDA dan/atau UPTD pengelola KEE.
- Kunjungan lapangan pada 11 unit KEE target.

Kunci Keberhasilan

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian kegiatan peningkatan efektivitas pengelolaan KEE dapat dilaksanakan pada 11 lokasi yang menjadi target IKK tahun 2022. Dengan demikian target IKK pada tahun 2022 dapat dicapai 100% dari total lokasi target tahun 2022. Keberhasilan capaian output kinerja tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran para pihak akan pentingnya upaya pelestarian KEE di wilayahnya;
- b. Koordinasi dan partisipasi aktif para pihak dalam pengelolaan KEE, sehingga berdampak pada pengelolaan KEE; dan
- c. Dukungan pendanaan para pihak yang memiliki komitmen dalam upaya pengelolaan KEE.



Upaya Tindak Lanjut yang Dilakukan Terhadap Keberhasilan

Terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti agar pencapaian target IKK dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya (pasca pencabutan Perdirjen KSDAE Nomor P.1/KSDAE/BPE2/KSA.4/2/2021), antara lain sebagai berikut:

- a. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antara UPT BBKSDA/ BKSDA dengan para pihak (Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Swasta, LSM, dan Masyarakat) dalam upaya peningkatan efektivitas pengelolaan KEE.
- b. Direktorat BPPE tetap melaksanakan pemantauan kemajuan efektivitas pengelolaan KEE dengan metode:
 - ✓ bimbingan teknis peningkatan efektivitas dan pemantauan progres pengelolaan KEE;
 - ✓ menggunakan kuesioner pemantauan kemajuan pengelolaan KEE secara daring melalui link <https://bit.ly/PemantauanEfektivitasNov2022>;
 - ✓ verifikasi kegiatan pengelolaan KEE melalui koordinasi dengan UPT dan stakeholder pada lokasi target.
 - ✓ meminta UPT untuk menyusun laporan pelaksanaan kegiatan (termasuk penggunaan anggaran) peningkatan efektivitas pengelolaan KEE dalam rangka pencapaian target IKK (Jumlah Unit KEE yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya).

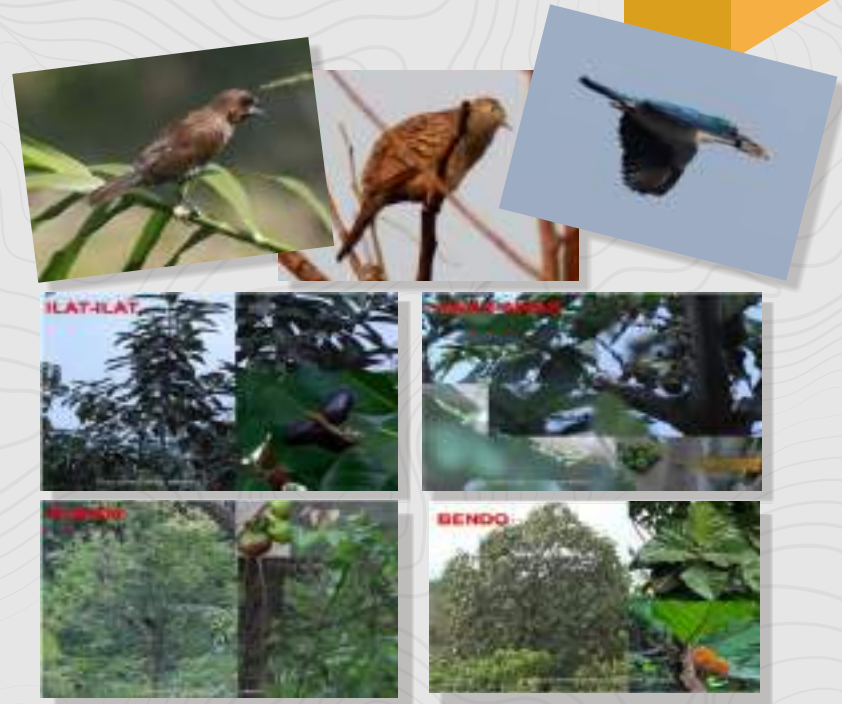
Output & Outcome Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan KEE di 11 Lokasi KEE TA 2022

No	KEE	Output (Kegiatan 4P)	Outcome
1.	Taman Kehati Jombang	a. Pengembangan pembibitan tanaman langka b. Pengembangan pusat edukasi Porang Bersama PDP Panglungan c. Penambahan spesies koleksi (saat ini tutupan vegetasi masih mencapai 60% dari 15 hektar luasan Taman Kehati). d. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam "Pengembangan Eko Wisata/ Research Tour ".	a. Spesies pohon pada tahun 2016 sebanyak 11 jenis dengan 72 tegakan dan tahun 2020 naik menjadi 42 jenis dengan 210 tegakan. b. Keanekaragaman burung sebanyak 30 jenis (tahun 2016) naik menjadi 40 jenis (tahun 2020) dan beberapa termasuk spesies dilindungi yaitu Elang hitam, Alap-alap sapi, Elang-ular bido. c. Keanekaragaman fauna non burung sebanyak 56 spesies (tahun 2016) naik menjadi 105 spesies (tahun 2020).
2.	Taman Kehati Sekadau	a. Perlindungan terhadap landsekap ekoregion dataran struktur Kapuas dengan tipe ekosistem riparian yang didominasi oleh vegetasi hutan gambut. b. Pengkayaan/penanaman terhadap jenis endemik Kalimantan Barat salah satunya adalah jenis tengkawang tungkul (Shorea stenoptera Burck). c. Pelibatan masyarakat (wanita) dalam pengelolaan Taman Kehati di Kabupaten Sekadau sebagai penataan dan perawatan taman. d. Lokasi Taman Kehati memiliki manfaat diantaranya adalah sebagai sara na penelitian dan Pendidikan, sebagai sumber pangan alternatif dan obat tradisional.	a. Terjadinya peningkatan tutupan vegetasi melalui kegiatan penanaman. Hal ini terlihat dari semakin bertambahnya tegakan yang ada juga menambah kerapatan tutupan tajuk dari tegakan tersebut sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas lingkungan. b. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan Taman Kehati maupun sebagai sumber pangan alternatif yaitu sebagai sumber buah-buahan lokal yang dapat dimanfaatkan ketika musim buah.
3.	Taman Kehati Puti Saloati	a. Penetapan area dan edukasi lingkungan dan sosialisasi tentang pentingnya Taman Kehati kepada masyarakat yang bermukim di sekitar Taman Keanekaragaman Hayati . b. Menambah koleksi tumbuhan/ tanaman lokal/ langka dan endemik pada unit ekosistem pada wilayah ekoregion. c. Melakukan pengumpulan, penanaman dan pengkayaan jenis-jenis tumbuhan/tanaman pada ekosistem di wilayah ekoregion sesuai dengan Desain Vegetasi dan melakukan pen gendalian jenis tumbuhan/ tanaman jenis asing/ invasif. d. Pengembangan ekowisata.	Kegiatan pengelolaan Taman Kehati Kota Solok dapat mempertahankan dan meningkatkan kondisi nilai penting kawasan dan vegetasi yang ada, sehingga dapat berfungsi sebagai sarana edukasi pendidikan dan wisata yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Total kunjungan wisata dalam negeri pada tahun 2021 mencapai 21.531 orang.

4.	KEE Karst Ciamis	a. Rehabilitasi/penanaman bibit pohon sebanyak 1.902 batang bibit di sekitar sumber mata air di kawasan karst Desa Sidamulih, Kabupaten Pamarican. b. Pemberian bantuan ekonomi produktif kelompok masyarakat sekitar karst Ciamis (Desa Cikupa dan Desa Sidamulih). c. Peningkatan kapasitas masyarakat sekitar kawasan karst dalam rangka mendukung kegiatan ekowisata Desa Cikupa dan kegiatan pertanian organik di kawasan karst Desa Sidamulih. d. Pengembangan Kampung Madu Jawa Barat di Desa Cikupa.	Kegiatan pengelolaan yang dilakukan dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat karena kegiatan pengelolaan (khususnya pemanfaatan karst secara berkelanjutan) dilakukan oleh masyarakat sekitar karst dan tidak merubah bentang alam. Kegiatan perlindungan kawasan karst Kabupaten Ciamis yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019 menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dalam pemberian ijin penambahan batu gamping untuk industri semen dan marmer.
5.	KEE Mangrove Mojo	a. Patroli Pengamanan dan pemantauan Kawasan yang dilaksanakan oleh BKSDA Jateng, POS TNI AL Tanjungsari, CDK V, Kelompok Pelita Bahari, Satuan Polisi Air Polres Pemalang. b. identifikasi, inventarisasi dan pemantauan jenis, penelitian dan pengembangan potensi pemanfaatan berkelanjutan oleh BKSDA Jawa Tengah dan DLHK Jawa Tengah. c. Penanaman/pengkayaan jenis dengan tanaman asli/pernah tumbuh secara alami dan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh CDK V. d. Pengembangan wisata alam berupa peningkatan kapasitas wisata kelompok.	Kegiatan pengelolaan KEE Mangrove Mojo yang dilakukan mampu mempertahankan keberadaan Kawasan mangrove Mojo beserta nilai pentingnya, baik itu keanekaragaman hayati yang ada didalamnya maupun fungsi ekologis/jasa ekosistem yang dihasilkannya. Hal ini tentunya mendukung keberlanjutan aktivitas ekowisata dan sektor perikanan.
6.	KEE Mangrove Jaring Halus	a. Pemantauan hutan adat Masyarakat Desa Jaring Halus dan pengamanan partisipatif b. Identifikasi Potensi Ekowisata di KEE Jaring Halus dilakukan oleh BBKSDA Sumut, Dinas Pariwisata dan Desa Jaring Halus c. Inventarisasi dan identifikasi mamalia air (pesut, lumba-lumba, dll) dilakukan oleh BBKSDA, FK3I dan Yagasu d. Penanaman atau pengkayaan jenis dengan tanaman asli atau pernah tumbuh secara alami dan pemeliharannya. e. Penguatan kapasitas dalam pelatihan pengolahan produk dari limbah kerang. f. Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Produk Mangrove / Unggulan Lokal desa sekitar	Pengelolaan KEE Mangrove Jaring Halus memberikan manfaat peningkatan perekonomian kepada masyarakat dari sektor perikanan. Selain itu manfaat ekologis pengelolaan ekosistem mangrove sebagai upaya pengurangan resiko bencana.

		KEE di Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat	
		g. Pelatihan budidaya lebah madu (2020)	
7.	ABKT Petungkriyono	a. Kegiatan perlindungan kawasan oleh Perum Perhutani, melibatkan masyarakat. b. Pemantauan satwa liar secara rutin di calon ABKT Petungkriyono. c. Kegiatan ekowisata yang dikelola kelompok sadar wisata (pokdarwis). d. Pelatihan pengolahan kopi kepada masyarakat sekitar mulai dari tahap pemanenan dan penjualan.	Kegiatan pengelolaan calon ABKT Petungkriyono menunjukkan outcome yang selaras dengan tujuan pengelolaan yaitu menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat sekitar kawasan dan penguatan nilai tambah terhadap sumber daya alam yang ada maupun pada pihak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini.
8.	ABKT Ciamis	a. Deliniasi lokasi ABKT Ciamis b. Pemeliharaan Kawasan ABKT c. Pemanfaatan ABKT Ciamis sebagai situs budaya kearifan lokal masyarakat yang melibatkan kelompok masyarakat, terutama juru kunci situs.	Kegiatan pengelolaan ABKT Kabupaten Ciamis telah memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, khususnya bagi para juru kunci situs.
9.	ABKT Kuala Lupak	a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. b. Pengamanan kawasan dilakukan oleh unit pengelola kawasan bersama masyarakat melalui pembentukan Pam Swakarsa, Masyarakat Peduli Api, dan wadah organisasi lain yang muncul dari masyarakat setempat. c. Pembinaan habitat berupa kegiatan pemeliharaan atau perbaikan lingkungan tempat hidup satwa dan atau tumbuhan. d. Identifikasi, inventarisasi dan pemantauan keanekaragaman hayati. e. Pemanfaatan jasa ekosistem ABKT Kuala Lupak sarana pendidikan, penelitian, pengembangan wisata alam, pemanfaatan air untuk irigasi dan kebutuhan rumah tangga. f. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui usaha alternatif yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat pada sektor ekowisata.	Kegiatan pengelolaan yang dilakukan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat secara tidak langsung berupa perlindungan dari bahaya abrasi dan terpaan angin laut karena Desa Kuala Lupak berada di Pesisir Laut.
10.	Koridor Hidupan Liar Tanjung Binerean	a. Mitigasi interaksi satwa, sosialisasi dan koordinasi pengelolaan, patroli area nesting ground, dan inisiasi penerbitan Peraturan Desa tentang Larangan Untuk Menebang Pohon dan Berburu Satwa di sekitar Koridor Hidupan Liar Tanjung Binerean b. Identifikasi, inventarisasi dan pemantauan	Pengelolaan Koridor Hidupan Liar Tanjung Binerean dapat memberikan manfaat berdasarkan tujuan dari pembangunan koridor, salah satunya berupa peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar KEE melalui pemberian bantuan dan pelatihan

		jenis, penyelamatan jenis baik di dalam habitat atau di luar habitat, penanaman/ pengkayaan tanaman local/langka/ endemik, penelitian dan pengembangan potensi pemanfaatan berkelanjutan. c. Pemanfaatan untuk lahan perkebunan/pertanian berkelanjutan (agroforestry), jasa ekosistem (sarana pendidikan, penelitian, wisata alam, pemanfaatan air untuk irigasi dan kebutuhan rumah tangga).	usaha alternatif.
11.	Koridor Hidupan Liar Penyu Lombok Barat	a. Melakukan patroli bersama masyarakat pada saat musim bertelur penyu, b. Melakukan sosialisasi/penyuluhan sebagai upaya perlindungan telur penyu dan induknya kepada masyarakat pesisir, c. Pemasangan papan informasi pelestarian penyu, relokasi dan penetasan telur penyu ke dalam sarang semi alami. d. Pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat/ stakeholders pelestari penyu. e. Penyelamatan penyu baik di dalam habitat atau di luar habitat, penelitian dan pengembangan potensi kehati. f. Pemanfaatan jasa ekosistem sebagai sarana edukasi pelepasliaran anak penyu kepada anak sekolah dan wisatawan.	a. Pengelolaan KEE Koridor penyu mempermudah komunikasi dan koordinasi antara anggota forum selaku pengelola KEE dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan - kegiatan yang dapat mendukung pelestarian penyu. b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya pelestarian penyu. c. Memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat melalui kegiatan ekowisata pelestarian dan pelepasliaran penyu. Kegiatan wisata membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar seperti tour guide, usaha kuliner dan penyewaan alat ban untuk aktivitas berenang di pantai.



Jenis satwa dan tanaman di Taman Kehati Kabupaten Jombang



Kegiatan Pemulihan di Taman Kehati Kabupaten Sekadaw





Kegiatan Penanaman di Beberapa Lokasi Sumber Mata Air di Kawasan Karst Desa Sidamulih, Kabupaten Pamarican



Kegiatan Pengawetan Jenis di KEE Mangrove Mojo



Fauna pada KEE Mangrove Mojo



Ikan cerebung yang menjadi hasil tangkapan masyarakat, olahan ikan cerebung oleh masyarakat di KEE Mangrove Jaring Halus





Para Perempuan dari Dusun Sokokembang, Desa Kayupuring, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan memilah kopi merah untuk diolah menjadi Kopi Owa (Sumber : Suara Merdeka, 2011)



Bekantan dan Lutung yang berada di ABKT Desa Kuala Lupak



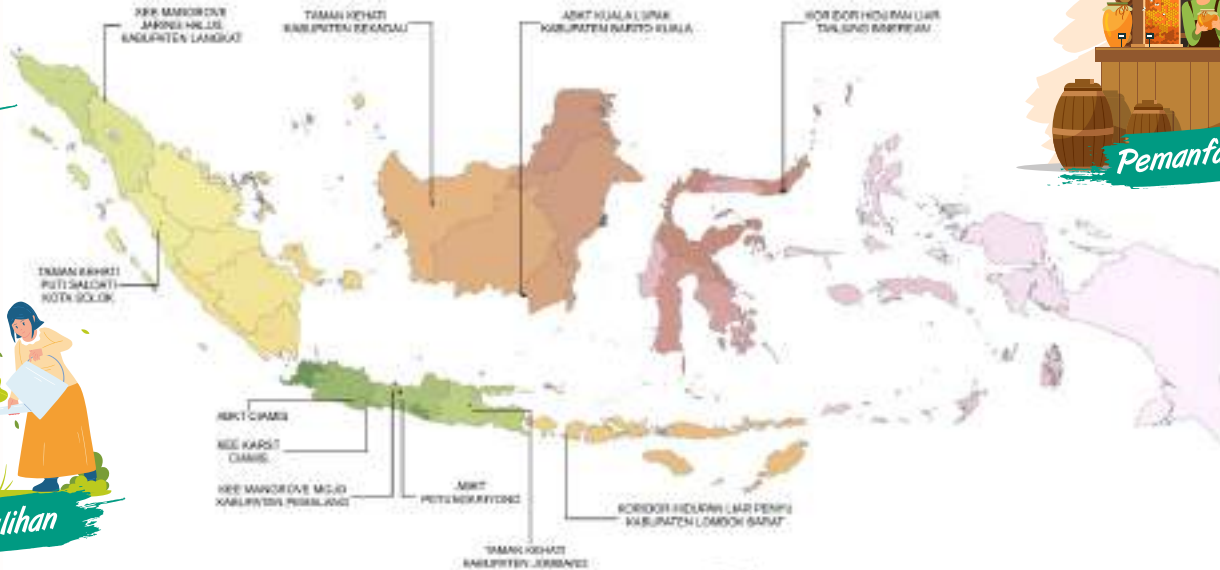
Papan Informasi ABKT Ciamis dan Papan Informasi Hutan Keramat Leuweung Gede



Burung Maleo saat datang ke nesting ground/ tempat bertelur di wilayah Koridor Hidupan Liar Tanjung Beinorean



Outcome



Hasil (output) dari peningkatan efektivitas pengelolaan KEE adalah dilaksanakannya kegiatan peningkatan efektivitas pengelolaan KEE di 11 lokasi target tahun 2022 melalui kegiatan perlindungan, pengawetan, pemulihan, dan pemanfaatan KEE. Sedangkan dampak (outcome) dari kegiatan peningkatan efektivitas pengelolaan KEE yang dilakukan berupa meningkatnya pelestarian keanekaragaman hayati serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar KEE.

Cerita dari Taman Kehati

Taman Kehati Kabupaten Jombang mampu mempertahankan nilai penting dari kawasan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan spesies pohon pada tahun 2016 dari 11 jenis dengan 72 tegakan menjadi 42 jenis dengan 210 tegakan pada tahun 2020. Keanekaragaman burung sebanyak 30 jenis (tahun 2016) naik menjadi 40 jenis (tahun 2020) dan beberapa termasuk spesies dilindungi yaitu Elang hitam, Alap-alap sapi, Elang-ular bido. Sedangkan untuk keanekaragaman fauna non burung sebanyak 56 spesies (tahun 2016) naik menjadi 105 spesies (tahun 2020). Selain itu, kegiatan pengelolaan Taman Kehati Kabupaten Jombang juga dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat berupa penjualan madu klenceng yang dijual Rp. 35.000,00 - Rp. 37.000,00/100ml



madu dari Taman Kehati
Kabupaten Jombang



keanekaragaman burung
di Taman Kehati Kab Jombang

3. Luas Ekosistem yang dipulihkan

Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, menyatakan bahwa pemulihan ekosistem di kawasan konservasi merupakan komponen kegiatan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Direktorat Kawasan Konservasi yaitu luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani (satuan dalam hektar). Kegiatan pemulihan ekosistem dilaksanakan dalam kerangka mendukung penanganan opened area di kawasan konservasi. Target pemulihan ekosistem yang ditetapkan dalam rangka mendukung penanganan opened area adalah 200.000 Ha.

Selanjutnya, seiring penataan, penyempurnaan dan penguatan kelembagaan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya pada Direktorat Jenderal KSDAE, Menteri LHK menerbitkan Peraturan Menteri LHK No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan peraturan tersebut, tugas dan fungsi pemulihan ekosistem di kawasan konservasi beralih dari Direktorat Kawasan Konservasi ke Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem. Perubahan ini juga memberikan implikasi pada perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2020 – 2024, dimana berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE nomor: P.1/KSDAE/SET.3/REN.2/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, pemulihan ekosistem menjadi salah satu indikator kinerja kegiatan pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2020 – 2024 dengan target sebesar 200.000 Ha.

Target capaian PE didasarkan pada target Perjanjian Kinerja pada tahun 2022 sebesar 24.912,48 Ha. Hal ini berbeda dengan target Renstra Ditjen KSDAE 2020-2024 yang mengamanatkan sebesar 45.000 Ha pada tahun 2022. Penetapan target dalam perjanjian kinerja Direktorat BPPE tahun 2022 sebesar 24.912,48 Ha disesuaikan dengan ketersediaan anggaran DIPA KSDAE tahun 2022 dan perubahan struktur program dari semula komponen kegiatan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).



Capaian Pemulihan Ekosistem Tahun 2022 per UPT

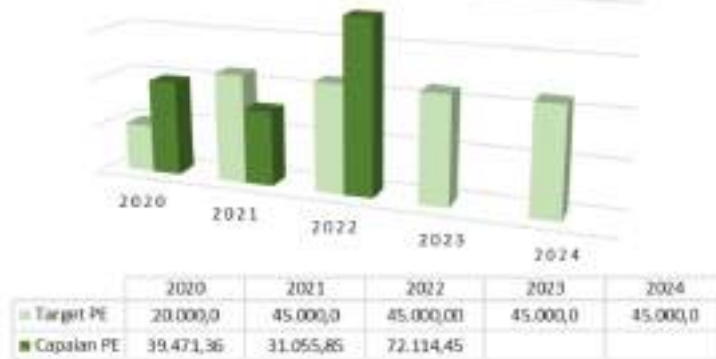
No	UPT Penanggung Jawab	Capaian PE 2022 (ha)			
		Mekanisme Alam	Rehabilitasi	Restorasi	Total Luas Capaian PE
I. BALAI BESAR/BALAI KSDA					
1	BBKSDA JABAR	1.052,89	104,97		1.157,86
2	BBKSDA JATIM	224,00	47,98	-	271,98
3	BBKSDA NTT	-	115,00	-	115,00
4	BBKSDA PAPUA	100,75	100,01	-	200,76
5	BBKSDA PAPUA BARAT	324,71	-	-	324,71
6	BBKSDA RIAU	925,00	20,00	-	945,00
7	BBKSDA SULSEL	-	-	-	-
8	BBKSDA SUMUT	-	473,68	-	473,68
9	BKSDA BALI	105,00	-	-	105,00
10	BKSDA BENGKULU LAMPUNG	503,95	1,30	-	505,25
11	BKSDA DI YOGYAKARTA	-	-	6,00	6,00
12	BKSDA DKI JAKARTA	-	17,23	2,67	19,90
13	BKSDA JAMBI	-	-	-	-
14	BKSDA JATENG	-	-	-	-
15	BKSDA KALBAR	2.099,65	-	-	2.099,65
16	BKSDA KALSEL	-	79,00	-	79,00
17	BKSDA KALTENG	25,80	594,80	-	620,60
18	BKSDA KALTIM	-	-	-	-
19	BKSDA MALUKU	50,00	-	-	50,00
20	BKSDA ACEH	-	-	15,00	15,00
21	BKSDA NTB	-	41,05	-	41,05
22	BKSDA SULTEG	-	60,00	-	60,00
23	BKSDA SULTRA	-	100,00	0,30	100,30
24	BKSDA SULUT	1.339,54	-	-	1.339,54
25	BKSDA SUMSEL	919,03	359,87	342,19	1.621,09
26	BKSDA SUMBAR	540,44	-	-	540,44

II. BALAI BESAR/BALAI TAMAN NASIONAL					
27	BBTN BETUNG KERIHUN DANAU SENTARUM	637,07	-	-	637,07
28	BBTN BROMO TENGGER SEMERU	-	77,00	-	77,00
29	BBTN BUKIT BARISAN SELATAN	-	189,00	-	189,00
30	BBTN GUNUNG GEDE PANGRANGO	45,58	19,03	-	64,61
31	BBTN GUNUNG LEUSER	-	525,30	-	525,30
32	BBTN KERINCI SEBLAT	227,08	110,10	179,00	516,18
33	BBTN LORE LINDU	13,99	-	-	13,99
34	BBTN TELUK CENDERAWASIH	63,89	3,69	0,00	67,59
35	BTN AKETAJAWA LOLOBATA	77,27	26,59	118,24	222,10
36	BTN ALAS PURWO	-	-	-	-
37	BTN BALI BARAT	-	110,40	-	110,40
38	BTN BALURAN	-	231,14	-	231,14
39	BTN BANTIMURUNG BULUSARAUNG	44,00	-	-	44,00
40	BTN BATANG GADIS	-	-	-	-
41	BTN BERBAK SEMBILANG	85,00	321,00	-	406,00
42	BTN BOGANI NANI WARTABONE	1.021,54	-	-	1.021,54
43	BTN BUKIT DUABELAS	-	56,00	-	56,00
44	BTN BUKIT BAKA BUKIT RAYA	-	42,09	-	42,09
45	BTN CEREMAI	-	-	113,33	113,33
46	BTN BUNAKEN	42.717,94	43,59	-	42.761,53
47	BTN BUKIT TIGAPULUH	156,00	-	9,00	165,00
48	BTN GUNUNG HALIMUN SALAK	-	391,64	-	391,64
49	BTN GUNUNG MERBABU	311,29	71,01	-	382,30
50	BTN GUNUNG MERAPI	-	125,00	-	125,00
51	BTN GUNUNG PALUNG	-	-	-	-
52	BTN GUNUNG RINJANI	-	131,00	-	131,00
53	BTN KARIMUN JAWA	0,00	-	0,94	0,94
54	BTN KAYAN MENTARANG	-	63,00	-	63,00
55	BTN KELIMUTU	-	-	-	-
56	BTN KEPULAUAN SERIBU	-	-	0,05	0,05
57	BTN KEPULAUAN TOGEAN	-	-	2,00	2,00
58	BTN KOMODO	-	63,00	-	63,00
59	BTN KUTAI	-	-	7.366,16	7.366,16
60	BTN LORENTZ	-	29,71	82,93	112,64
61	BTN MATALAWA	-	145,34	-	145,34
62	BTN MANUSALA	100,00	-	-	100,00
63	BTN MERU BETIRI	-	371,80	-	371,80
64	BTN RAWA AOPA	130,00	100,00	50,00	280,00
65	BTN SEBANGAU	1.809,47	124,37	-	1.933,84
66	BTN SIBERUT	180,00	-	30,00	210,00
67	BTN TAKA BONERATE	-	0,01	0,13	0,14
68	BTN TAMBORA	-	45,00	-	45,00
69	BTN TANJUNG PUTTING	250,00	260,00	-	510,00
70	BTN TESSO NILO	-	-	-	-
71	BTN UJUNG KULON	1.223,40	98,85	-	1.322,25
72	BTN WASUR	-	-	20,00	20,00
73	BTN WAKATOBI	10,50	-	0,30	10,80
74	BTN WAY KAMBAS	-	203,47	368,41	571,88
JUMLAH		57.314,79	6.093,01	8.706,65	72.114,45

Capaian kegiatan Pemulihan Ekosistem tahun 2022 seluas 72.114,45 Ha dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja Direktorat BPPE tahun 2022 seluas 24.912,48Ha, tercapai sebesar 289,47%. Dengan pembatasan nilai maksimal capaian kinerja sebesar 150% maka pencantuman nilai capaian kinerja Pemulihan Ekosistem sebesar 150%.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan rencana strategis tahun 2020-2024, capaian Pemulihan Ekosistem kumulatif seluas 144.661,66 Ha atau 72,33% dibandingkan target 5 (lima) tahun seluas 200.000 Ha.

TARGET DAN CAPAIAN PE 2020-2024



Berdasarkan jenis tindakan Pemulihan Ekosistem, dapat dijelaskan bahwa kegiatan pemulihan ekosistem yang dominan dilaksanakan oleh UPT melalui mekanisme alam, yaitu sebesar 89%. Sedangkan untuk perlakuan rehabilitasi sebesar 8% dan restorasi sebesar 3%. Pemilihan jenis tindakan pemulihan ekosistem dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran pada masing-masing UPT.

Kebutuhan anggaran pemulihan ekosistem melalui mekanisme penanaman intensif sebagaimana tercantum dalam Standar Kegiatan Biaya (SKB) pada Perdirjen KSDAE Nomor 11/KSDAE/SET/REN.0/12/2020 tentang standar kegiatan dan biaya bidang KSDAE tahun 2021 adalah sebesar Rp17.059.000, per hektar. Sehingga apabila digunakan untuk mencapai target Renstra Ditjen KSDAE sebesar 45.000 hektar dibutuhkan anggaran sebesar Rp767,6 Milyar.



Capaian Pemulihan Ekosistem



Beberapa hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan pemulihan ekosistem tahun 2022 diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan pemulihan ekosistem di kawasan dengan konflik tenurial

Pelaksanaan pemulihan ekosistem diprioritaskan pada kawasan dengan status clear and clean, namun kebijakan tersebut menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya. Terdapat beberapa UPT yang melaksanakan pemulihan di kawasan yang memiliki konflik tenurial.

2. Pedoman pelaksanaan pemulihan ekosistem (NSPK)

Pedoman pemulihan ekosistem belum tersedia secara komprehensif. Kebutuhan pedoman yang diperlukan di tingkat lapangan diantaranya adalah:

- pedoman pelaksanaan pemulihan ekosistem di kawasan perairan
- pedoman penilaian keberhasilan pelaksanaan pemulihan ekosistem sesuai tipologi ekosistem (hutan tropis, gambut, karst, perairan tawar, gambut, mangrove, lamun, terumbu karang dan sebagainya;
- pedoman tentang kegiatan perlindungan dan pengamanan pada tindakan mekanisme alam; pedoman penanganan gulma/jenis invasif dan sebagainya.

3. Standar biaya dan kegiatan pemulihan ekosistem

Standar biaya dan kegiatan pemulihan ekosistem masih belum relevan/sesuai dengan biaya pelaksanaan kegiatan di lapangan. Standar biaya dan kegiatan masih memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan agar lebih implementatif.



4. Mekanisme kerjasama pemulihan ekosistem

Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem melalui kegiatan Rehabilitasi DAS oleh pemegang IPPKH/PKH masih terkendala oleh proses pengajuan persetujuan Kerjasama/PKS pada Ditjen KSDAE. Persetujuan kerjasama membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga berimplikasi terkendalanya pelaksanaan pemulihan ekosistem yang telah dipersiapkan di tingkat tapak. Hal ini perlu diatasi dengan penyusunan edaran Ditjen KSDAE terkait percepatan pelaksanaan pemenuhan kewajiban IPPKH di dalam kawasan konservasi.

6. Anggaran

Keterbatasan anggaran pada DIPA Ditjen KSDAE perlu disikapi dengan strategi-strategi pencapaian target dengan mengoptimalkan sumber pendanaan yang tersedia, baik melalui kerjasama, kemitraan, dan sebagainya.

Berdasarkan capaian-capaian pemulihan ekosistem tahun 2022 beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti adalah:

1. Lokasi rencana pemulihan ekosistem diprioritaskan pada kawasan yang clear and clean. Unit Pelaksana Teknis perlu mengidentifikasi kawasan yang memiliki konflik tenurial untuk selanjutnya melakukan implementasi penyelesaian konflik tenurial. Serangkaian upaya yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan konflik tenurial di dalam kawasan konservasi meliputi pelaksanaan tindak lanjut kesepakatan para pihak yang berkonflik, hingga seluruh rekomendasi telah dilaksanakan secara tuntas dengan verifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penguatan terhadap regulasi pemulihan ekosistem khususnya terhadap gap-gap regulasi yang perlu adanya intervensi signifikan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan prioritas penyusunan/pembenahan regulasi/NSPK sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan.



3. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi dengan para pihak yang memiliki kepentingan guna percepatan pelaksanaan pemulihan ekosistem di tingkat tapak. Stakeholder potensial yang terkait dengan pemulihan ekosistem diantaranya adalah Ditjen PDASRH, Ditjen PPKL, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi, Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, BRGM, NGO, swasta dan sebagainya. Sinkronisasi dilakukan terhadap integrasi perencanaan pemulihan ekosistem, penanganan prakondisi lokasi pemulihan ekosistem yang belum clear and clean, penanganan sumber-sumber penyebab kerusakan kawasan lainnya (sampah, kebocoran limbah B3, vesel grounding, dll) dan sebagainya.
4. Penguatan jejaring pendanaan dari berbagai mekanisme sumber pendanaan baik dari Ditjen PDASRH, BRGM, pemenuhan kewajiban Rehabilitasi DAS dari pemegang IPPKH/PKH, donor, NGO, dan sebagainya.
5. Penguatan sistem pendataan capaian pemulihan ekosistem yang lebih efektif guna menghasilkan data yang benar-benar valid. Penguatan juga diperlukan terhadap kapasitas walidata pemulihan ekosistem di tingkat UPT Ditjen KSDAE. lalui kerjasama, kemitraan, dan sebagainya.





Menurunnya konflik tenurial di kawasan konservasi



Meningkatnya partisipasi Masyarakat dan peran serta perempuan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi

Outcome



Meningkatnya daya dukung habitat sehingga keberadaan populasi spesies satwa liar dapat lestari



Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan dengan adanya peningkatan pendapatan/pekerjaan

Cerita dari UPT tentang PE



penggunaan pupuk & mikroba untuk
meningkatkan keberhasilan pertumbuhan



modifikasi media tanam



petugas hadir dan aktif mendampingi

"Kunci keberhasilan pelaksanaan PE di Taman Nasional Gunung Ciremai adalah melakukan upaya optimalisasi penerapan strategi pemulihan ekosistem sesuai karakteristik lokasi yang akan dipulihkan berupa pemilihan jenis bibit dan improvisasi penambahan media tanam yang didukung dengan pengaplikasian potensi bioprospeksi kawasan TNGC pada tanaman PE berupa mikroba bermanfaat (bakteri pemacu pertumbuhan PGPR dan tahan kekeringan) dan pupuk hayati Azolla, serta keterlibatan aktif kelompok masyarakat mulai dari persiapan, penanaman sampai dengan pemeliharaan tanaman"

Maman Surahman, S.Hut., M.Si.
(Kepala Balai TN Gunung Ciremai)



pelibatan masyarakat dalam kegiatan
Pemulihan Ekosistem

Strategi keberhasilan PE pada Balai KSDA Sumatera Selatan antara lain: 1) pelibatan masyarakat sekitar kawasan dan dukungan para pihak, 2) petugas hadir dan aktif mendampingi serta melakukan monitoring-evaluasi mandiri pada tingkat tapak, 3) pemilihan jenis/spesies dengan mempertimbangkan tipologi, aspek teknis dan sosial. -

Ujang Wisnu Barata, S.Hut., M.Sc., M.Si
(Kepala Balai KSDA Sumatera Selatan)

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem tahun 2022 untuk 3 (tiga) kegiatan pokok Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem sebesar Rp. 2.487.975.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.487.456.393,- atau 99,98%.

No	Output	Pagu Anggaran	Realisasi sampai dengan 31 Des 2022	%
1	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	601.375.000	601.293.501	99,99
2	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	1.245.700.000	1.245.443.525	99,98
3	Luas ekosistem yang dipulihkan	640.900.000	640.719.367	99,97
Total		2.487.975.000	2.487.456.393	99,98

Berdasarkan perbandingan data penyerapan anggaran sebesar 99,98% dan capaian kinerja sebesar 110%, maka diperoleh angka efisiensi kinerja sebesar 0,91. Angka ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja dan anggaran Direktorat BPPE tahun 2022 efisien.

Pada aplikasi SMART output kinerja Direktorat BPPE berupa rekomendasi kebijakan, yaitu 1 rekomendasi kebijakan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi, 1 rekomendasi kebijakan Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya dan 1 rekomendasi Kebijakan Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi dan ekosistem esensial. Berdasarkan aplikasi kinerja SMART capaian kinerja Direktorat BPPE sebesar 100%.

Upaya tindak lanjut dilakukan dengan memprioritaskan capaian kinerja pada target-target lokasi yang diperkirakan dapat diselesaikan dengan anggaran seminimal mungkin (efisiensi anggaran) atau yang dapat diselesaikan dengan menggunakan dukungan anggaran dan SDM dari Pemda, UPT KSDA atau mitra.

PENUTUP



04

IV. PENUTUP

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022 merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Laporan Kinerja Direktorat BPPE Tahun 2022 merupakan laporan hasil pencapaian kinerja selama tahun 2022, disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja Direktorat BPPE tahun 2022 menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Direktorat BPPE sebagai penjabaran dari Perjanjian Kinerja Direktorat BPPE melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022.

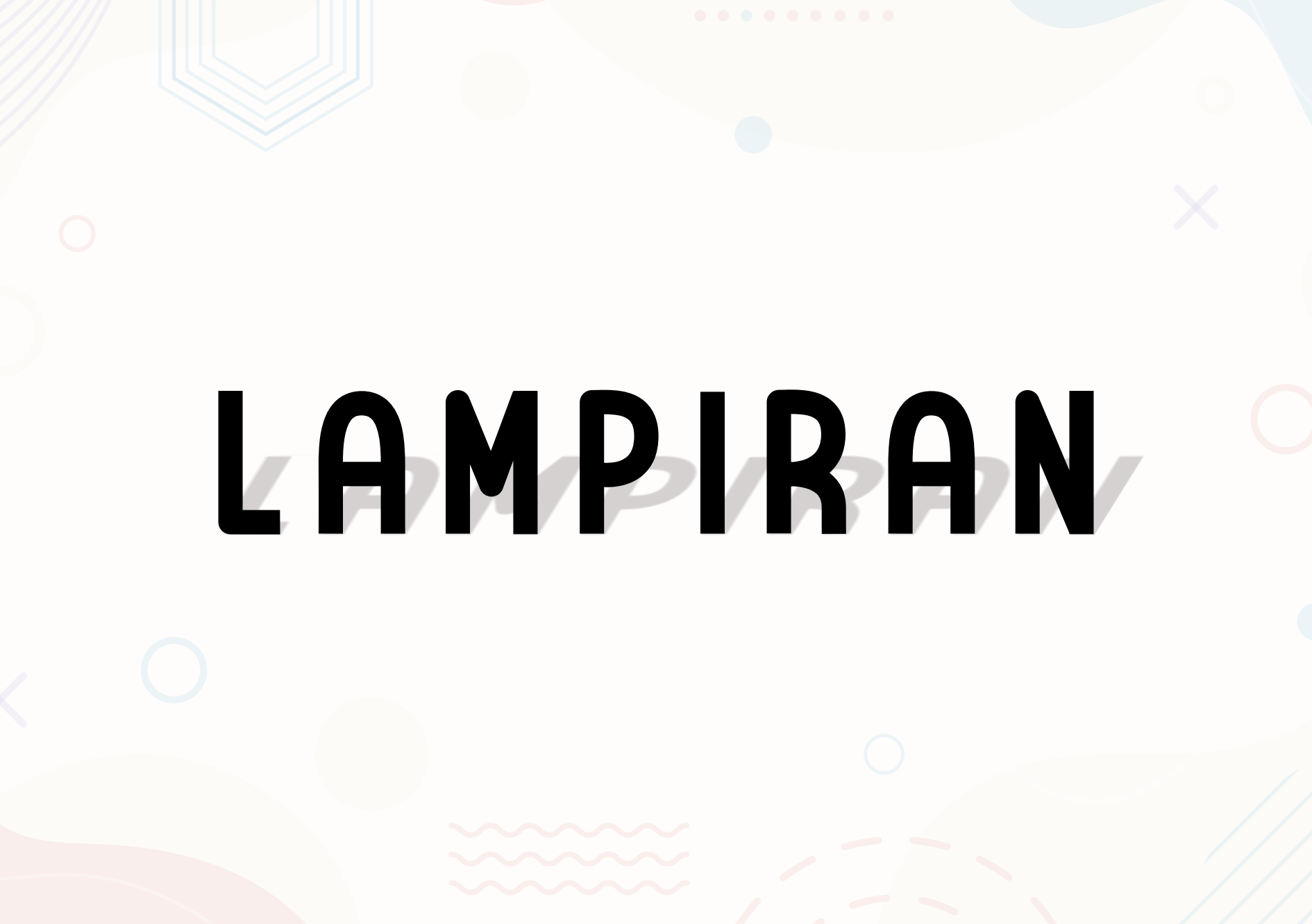
Nilai Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat BPPE pada tahun 2022 sebesar 110%, dengan realisasi anggaran sebesar 99,98%. Dengan demikian, pencapaian kinerja pada tahun 2022 dapat dikatakan efisien.

Meskipun pandemi Covid-19 masih terjadi tahun 2022, namun para pegawai Direktorat BPPE mampu beradaptasi serta masih mampu memberikan sumbangsih bagi kinerja Direktorat BPPE secara optimal.

Beberapa hal yang menjadi perhatian terhadap pencapaian kinerja Direktorat BPPE antara lain penyediaan kebijakan-kebijakan serta fasilitasi dan koordinasi dengan pihak yang berperan.

Akhir kata semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan menjadi pembelajaran untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.



The background is a light cream color with various abstract geometric shapes and patterns. There are concentric hexagons in the top left, a dotted line in the top center, a small blue circle in the top right, a purple 'x' in the middle right, a pink circle in the middle right, a blue circle in the bottom left, a pink circle in the bottom left, a blue circle in the bottom right, and wavy lines in the bottom center. The word "LAMPIRAN" is written in a bold, black, sans-serif font, centered horizontally and slightly shadowed.

LAMPIRAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN EKOSISTEM**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Nandang Prihadi, S.Hut, M.Sc
Jabatan : Plt. Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Wiratno, M.Sc
Jabatan : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2021

Pihak Pertama,

Dr. Nandang Prihadi, S.Hut, M.Sc
NIP. 19691204 199503 1 001

Pihak Kedua,

Ir. Wiratno, M.Sc
NIP. 19620328 198903 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Nandang Prihadi, S.Hut, M.Sc
Jabatan : Plt. Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem

Berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2021
Plt. Direktur,

Dr. Nandang Prihadi, S.Hut, M.Sc
NIP. 19691204 199503 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN KERJA

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Unit Satuan Kerja : Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem
Tahun Anggaran : 2022

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET IKK	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (RO)	RINCIAN OUTPUT (RO)
1	Meningkatnya kawasan yang dilakukan inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	10 Juta Hektar	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Kebijakan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi
2	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	11 Unit KEE	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	002-Kebijakan ekosistem esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya
3	Meningkatnya Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi	Luas ekosistem yang dipulihkan	24.912,28 Hektar	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kebijakan Pemulihan Ekosistem di kawasan konservasi dan ekosistem esensial

Program/Kegiatan :

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

1. Pemulihan Ekosistem

Program Kualitas Lingkungan Hidup

1. Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial

Total Anggaran :

Anggaran :

700.000.000

1.930.075.000

2.630.075.000



Direktur Jenderal,

Ir. Wiratno, M.Sc

NIP. 19620328 198903 1 003



Jakarta, Desember 2021

Plt. Direktur,

Dr. Nandang Pihadi, S.Hut, M.Sc

NIP. 19691204 199503 1 001

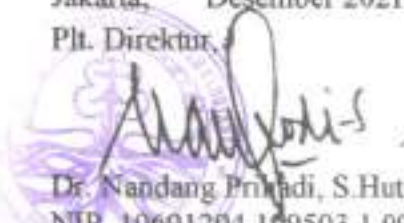
**RENCANA AKSI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN KERJA**

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Unit Satuan Kerja : Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem
Tahun Anggaran : 2022

KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	B03		B06		B09		B12	
				Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan	Target	Satuan
Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial	Meningkatnya kawasan yang dilakukan inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	10 Juta Hektar	0	Hektar	0	Hektar	3,4 juta	Hektar	10 juta	Hektar
				Penjelasan Capaian: Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada koordinasi dan persiapan bintek		Penjelasan Capaian: Pelaksanaan kegiatan berupa bintek inver potensi kehati tinggi		Penjelasan Capaian: Target capaian inver potensi kehati tinggi meliputi UPT pada region Jawa, Sumatera dan Sulawesi		Penjelasan Capaian: Seluruh target luasan inver potensi kehati tinggi diharapkan tercapai dan telah dilaksanakan proses verifikasi melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi Tim Pusat	
	Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan ekosistem esensial	Jumlah kawasan ekosistem esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolannya	11 Unit KEE	0	Unit KEE	0	Unit KEE	5	Unit KEE	11	Unit KEE
				Penjelasan Capaian: Pelaksanaan kegiatan berupa review NSPK		Penjelasan Capaian: Pelaksanaan kegiatan berupa Bintek		Penjelasan Capaian: Target capaian peningkatan efektivitas KEE pada region Jawa		Penjelasan Capaian: Seluruh target (11 unit KEE) tercapai	
Pemulihan Ekosistem	Meningkatnya pemulihan ekosistem di kawasan konservasi	Luas ekosistem yang dipulihkan	24.912,28 Hektar	0	Hektar	0	Hektar	13.750	Hektar	24.912,28	Hektar
				Penjelasan Capaian: Pelaksanaan kegiatan meliputi koordinasi dan penyusunan NSPK		Penjelasan Capaian: Pelaksanaan kegiatan berupa Bintek		Penjelasan Capaian: Target capaian luas ekosistem yang dipulihkan pada region Sumatera dan Jawa		Penjelasan Capaian: Target luas ekosistem tercapai	

Jakarta, Desember 2021

Plt. Direktur,


Dr. Nandang Priyadi, S.Hut, M.Sc
NIP. 19691204 199503 1 001

Lampiran 2

TARGET LOKASI PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	No	Lokasi Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			1	BKSDA Kalimantan Barat - KEE Koridor Sungai Putri	BKSDA Kalimantan Timur-Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay	BKSDA Sulawesi Utara-Koridor Tanjung Binerean	BKSDA Sumatera Barat-Koridor Harimau dan Satwa Liar lainnya Kab Solok dan Dharmasraya	BKSDA Aceh-Koridor Bener Meriah
			2	BKSDA Kalimantan Tengah - ABKT Lahan Basah Danau Bagantung	BKSDA Bengkulu-Koridor Gajah Lansekap Seblat	BKSDA NTB-Koridor Penyu Lombok Barat	BKSDA Sulawesi Tenggara -Koridor Foobula	BKSDA Jambi-Koridor Gajah Bukit Tigapuluh
			3	BBKSDA Jawa Barat ekosistem Karst Kabupaten Ciamis	BKSDA Jawa Tengah - ABKT Gunung Ungaran	BKSDA NTB-ABKT Kab. Lombok Utara	BKSDA Kalimantan Selatan - ABKT Tanah Laut	BBKSDA Jatim - Pantai Kili-kili
			4	BBKSDA Jawa Barat Taman Keanekaragaman Hayati Kota Cirebon	BKSDA Jawa Tengah -ABKT Petungkriyono	BBKSDA Jawa Barat - ABKT Kab. Ciamis	BKSDA Maluku-ABKT Tanjung Maleo Negeri Kailolo	BBKSDA Jatim - Pulau Masakambing

			5	BKSDA Sumatera Selatan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Belitung	BKSDA Kalimantan Selatan - ABKT Tanah Laut	BKSDA Kalimantan Timur- ABKT Danau Mesangat	BKSDA Sulawesi Tengah- ABKT Kabupaten Tojo Una-una	BKSDA Maluku - ABKT Pulau Buano
			6	BKSDA Sulawesi Tengah Taman Keanekaragaman Hayati Banggai Kepulauan	BBKSDA NTT-ABKT Rote Ndao	BBKSDA Jawa Timur Ekosistem Karst Kabupaten Trenggalek	BBKSDA NTT-ABKT Hutan Lindung POTA, Kec. Sambi Rampas, Kab. Manggara Timur	BKSDA Yogyakarta Ekosistem Karst Gunung Kidul
			7	BBKSDA Jawa Timur KEE Mangrove Teluk Pangpang Kabupaten Banyuwangi	BBKSDA Sulawesi Tengah Ekosistem Karst Kabupaten Banggai Kepulauan	BKSDA Sumatera Barat Taman Keanekaragaman Hayati Kota Solok Provinsi Sumatera Barat	BBKSDA Jawa Barat Ekosistem Karst Kabupaten Tasikmalaya	BKSDA Kalimantan Selatan Selatan Taman Keanekaragaman hayati Kota Banjar Baru
			8	BKSDA Bengkulu KEE Mangrove Lampung Timur Provinsi Lampung	BBKSDA Jawa Barat Taman Keanekaragaman Hayati Kiara Payung Provinsi Jawa Barat	BKSDA Kalimantan Barat Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sekadau	BKSDA Jawa Barat Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Bandung	BKSDA Sumatera Selatan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Muara Enim
			9	BKSDA NTB KEE Mangrove Lambo Kabupaten Bima	BBKSDA Jawa Timur Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten	BKSDA Sumatera Selatan Taman Keanekaragaman	BKSDA Sumatera Barat Taman Keanekaragaman	BKSDA Sumatera Selatan KEE Mangrove Lepar

					Jombang Provinsi Jawa Timur	Hayati Bangka Tengah	Hayati Kabupaten Padang Pariaman	Pongok Kabupaten Bangka Selatan
			10	BKSDA Jawa Tengah KEE Mangrove Desa Ayah Kabupaten Kebumen	BBKSDA Jawa Barat Taman Kehati Kabupaten Kuningan	BKSDA Jawa Tengah KEE Mangrove Mojo Kabupaten Pemalang	BKSDA Sulawesi Utara KEE Mangrove Torosiaje Provinsi Gorontalo	BKSDA Jawa Tengah KEE Mangrove Kabupaten Rembang
			11	BKSDA NTB KEE Mangrove Lombok Barat	BBKSDA Jawa Timur KEE Mangrove Ujung Pangkah Kabupaten Gresik	BBKSDA Sumatera Utara KEE Mangrove Jaring Halus Kabupaten Langkat	BKSDA Maluku KEE Mangrove Kao Kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara	BKSDA Jambi KEE Mangrove Pantai Cemara Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Lampiran 3

Matriks Target dan Luasan Indikatif
Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi

	No	UPT Penanggung Jawab	No	Provinsi	Luasan Indikasi (Ha)	Target InVer per UPT per tahun (Ha)				
						2020*	2021	2022	2023	2024
TARGET NASIONAL					43,000,000	8,000,000	10,037,531	10,000,000	10,000,000	5,731,500
SUMATERA					10,917,217	2,431,519	2,199,835	2,199,835	2,143,014	1,943,016
	1	BKSDA NAD	1	ACEH	1,908,934	333,203	393,933	393,933	393,933	393,933
	2	BBKSDA Sumatera Utara	2	SUMATERA UTARA	1,428,460	294,187	283,568	283,568	283,568	283,568
	3	BKSDA Sumatera Barat	3	SUMATERA BARAT	920,615	294,187	156,607	156,607	156,607	156,607
	4	BBKSDA Riau	4	RIAU	3,348,378	627,381	711,502	711,502	711,501	711,503
			5	KEPULAUAN RIAU	125,013					
	5	BKSDA Bengkulu Lampung	6	BENGKULU	307,810	294,187	156,820	156,820	-	-
			7	LAMPUNG	300,017					
	6	BKSDA Sumatera Selatan	8	SUMATERA SELATAN	1,513,061	294,187	351,922	351,922	351,922	351,922

			9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	188,814					
	7	BKSDA Jambi	10	JAMBI	876,115	294,187	145,482	145,482	245,482	45,482
KALIMANTAN					14,019,138	1,548,966.00	3,992,343	4,079,721	3,762,139	635,969
	8	BKSDA Kalimantan Selatan	11	KALIMANTAN SELATAN	473,769	333,203	35,141	61,656	43,769	-
	9	BKSDA Kalimantan Tengah	12	KALIMANTAN TENGAH	5,420,951	333,203	1,271,937	1,271,937	1,907,906	635,969
	10	BKSDA Kalimantan Timur	13	KALIMANTAN TIMUR	3,064,353	549,356	1,749,602	874,801	874,801	-
			14	KALIMANTAN UTARA	984,209					
	11	BKSDA Kalimantan Barat	15	KALIMANTAN BARAT	4,075,856	333,204	935,663	1,871,326	935,663	-
JAWA					511,407	1,020,680.00	-	-	-	-
	12	BBKSDA Jawa Barat	16	JAWA BARAT	172,551	255,170	-	-	-	-
			17	BANTEN	7,957					
	13	BKSDA Jawa Tengah	18	JAWA TENGAH	71,518	255,170	-	-	-	-
	14	BBKSDA Jawa Timur	19	JAWA TIMUR	257,479	255,170	-	-	-	-
	15	BKSDA DIY	20	DI YOGYAKARTA	1,742	255,170	-	-	-	-

	16	BKSDA Jakarta	21	DKI JAKARTA	160	-	-	-	-	-
SULAWESI					6,059,189	1,332,816.00	1,181,593	1,246,103	1,407,318	891,359
	17	BBKSDA Sulawesi Selatan	22	SULAWESI BARAT	765,601	333,204	502,112	502,112	502,112	502,112
			23	SULAWESI SELATAN	1,576,050					
	18	BKSDA Sulawesi Tengah	24	SULAWESI TENGAH	1,890,192	333,204	389,247	389,247	389,247	389,247
	19	BKSDA Sulawesi Tenggara	25	SULAWESI TENGGARA	1,236,104	333,204	225,725	225,725	451,450	-
	20	BKSDA Sulawesi Utara	26	SULAWESI UTARA	263,258	333,204	64,510	129,019	64,510	-
			27	GORONTALO	327,984					
BALINUSRA					929,167	999,612.00	189,311	-	-	-
	21	BKSDA Bali	28	BALI	73,448	333,204	-	-	-	-
	22	BKSDA NTB	29	NUSATENGGA BARAT	336,748	333,204	3,544	-	-	-
	23	BBKSDA NTT	30	NUSATENGGA TIMUR	518,971	333,204	185,767	-	-	-
MALUKU					1,124,412	333,204.00	197,802	197,802	197,802	197,802
	24	BKSDA Maluku	31	MALUKU	681,046	333,204	197,802	197,802	197,802	197,802
			32	MALUKU UTARA	443,366					

PAPUA					9,439,471	333,203.00	2,276,647	2,276,541	2,489,727	2,063,355
	25	BBKSDA Papua	33	PAPUA	7,404,054	333,203	1,767,713	1,767,713	1,980,899	1,554,527
	26	BBKSDA Papua Barat	34	PAPUA BARAT	2,035,312	-	508,828	508,828	508,828	508,828
			0	PULAU TIDAK TERDEFINISI	106	-	106	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR (IKK)	Lokasi	TARGET						Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2.021	2022	2023	2024	
KEGIATAN 5423 : PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI										208.224	66.727	64.577	80.721	83.950	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan	Jumlah destinasi wisata alam prioritas	34 Provinsi	Destinasi	15	15	15	15	15						
		Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan panas bumi dan karbon	34 Provinsi	Entitas	4	12	21	31	40						
		Jumlah perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air	34 Provinsi	Unit	15	30	40	50	60						
		Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education	34 Provinsi	Destinasi	7	7	7	52	52						
		Jumlah destinasi wisata alam bahari	34 Provinsi	Destinasi	3	3	3	7	7						
KEGIATAN 6742 : PEMULIHAN EKOSISTEM										0	0	45.451	56.814	59.086	Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem
	Meningkatnya pemulihan ekosistem	Luas ekosistem yang dipulihkan	34 Provinsi	Hektar	20.000	65.000	110.000	155.000	200.000						
PROGRAM 029.FD : KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP										10.099	7.919	12.420	15.525	16.146	
KEGIATAN 6743 : PEMBINAAN PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL										10.099	7.919	12.420	15.525	16.146	Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem
	Meningkatnya kawasan yang dilakukan inventarisasi dan Verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	34 Provinsi	Hektar	8.000.000	18.000.000	28.000.000	38.000.000	43.000.000						
	Meningkatnya efektifitas pengelolaan kawasan ekosisten esensial	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	34 Provinsi	Unit KEE	11	22	33	44	55						




DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN EKOSISTEM
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN